



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

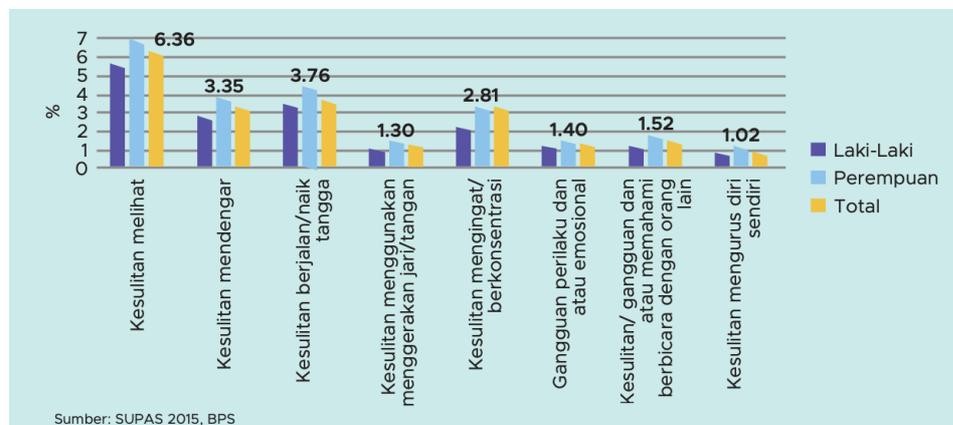
Disabilitas merupakan isu yang terus menjadi perhatian dunia Internasional dan terus berkembang di Indonesia. Kondisi ini diawali dengan disahkannya *Convention on the Rights of People with Disabilities/UN CRPD* oleh PBB pada tanggal 10 November 2011. Terbentuknya CRPD membuka harapan baru dalam perkembangan isu disabilitas. Dilansir dari artikel website World Health Organization (WHO, 2013) Konvensi ini menantang setiap orang di seluruh dunia untuk memahami bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas tidak hanya dipandang sebagai *charity based* namun sebagai hak asasi manusia dan kemanusiaan. Sejak saat itu, disabilitas dipahami sebagai suatu hambatan yang terjadi karena lingkungan yang kurang mendukung, baik itu sarana prasarana maupun pandangan negatif atau diskriminasi dari masyarakat di sekitarnya (Bantekas, Stein, & Anastasiou, 2018).

Menurut peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Fajri Nursyamsi, kini pemerintah Indonesia terus berupaya dalam memenuhi hak disabilitas secara hukum (Nursyamsi, 2015). Komitmen dan kesungguhan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan teman-teman disabilitas terangkum dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2011. Selain itu pemerintah juga membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, lalu lintas dan transportasi umum, dan lainnya. Peraturan tersebut memberi jaminan kepada teman-teman

disabilitas agar memperoleh hak asasi serta kedudukan hukum yang sama sebagai warna negara.

Berdasarkan UU No.8 Tahun 2016 dalam Infodatin Kementerian Kesehatan RI, terdapat empat ragam kategori disabilitas meliputi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensori yang dapat dialami secara tunggal atau multi yang ditetapkan oleh tenaga medis dalam jangka waktu lama. Dalam hal ini disabilitas netra termasuk dalam jenis disabilitas sensorik. Data hasil survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) BPS 2015 tercatat bahwa 8,56% atau sekitar 21,84 juta penduduk di Indonesia memiliki disabilitas dan persentase disabilitas terbesar adalah kesulitan melihat yaitu sebesar 6,36% (Ismandari, 2019).

**Gambar 1. 1 Persentase Jumlah Disabilitas di Indonesia**



Sumber: SUPAS BPS, 2015

Dari estimasi jumlah 6,36% disabilitas netra dari seluruh penduduk Indonesia, 5,51% di antaranya mengalami lemah penglihatan, sejumlah 0,72% memiliki tingkat kesulitan melihat berat dan 0,13% mengalami *total blind*.

Dikutip dari artikel *Six problems that exclude disabled people in Indonesia from public life* oleh (Pramana, 2018) Faktor kegagalan mendasar Indonesia

melibatkan penyandang disabilitas dalam kehidupan publik dan dalam proses pembangunan disebabkan karena kurangnya pemahaman atau *awareness* dari masyarakat maupun aparat pemerintah terkait apa itu makna disabilitas dan keberadaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara. Penyandang disabilitas seringkali mendapatkan stigma negatif dari masyarakat, adanya pemahaman negatif yang berasal dari pola pikir yang didominasi dengan konsep normalitas. Seringkali mereka dianggap ‘berbeda’ sehingga tidak mampu berperan bahkan tidak dapat diterima sebagai bagian dari komunitas, pendidikan maupun pekerjaan (Widinarsih, 2019).

Kedua, hak dan kesempatan fasilitas berupa aksesibilitas fisik dan non-fisik untuk teman-teman disabilitas masih sangat terbatas sehingga mereka sulit untuk dapat beraktivitas secara mandiri. Gufroni Sakari selaku Ketua Umum Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) mengakui ketersediaan sarana dan prasarana ramah difabel yang dijanjikan pemerintah pada pelaksanaannya masih minim, belum sepenuhnya memberikan kemudahan akses mobilitas mereka. Kenyataan di lapangan yang masih sering terlihat ialah trotoar hak pejalan kaki masih jauh dari kenyamanan, bahkan untuk keamanan penggunaannya.

Maka dari itu, pemerintah perlu memperhatikan dan terus mendorong setiap daerah dalam hal pemenuhan hak penyandang disabilitas salah satunya dengan pemerataan pembangunan sarana publik yang menunjang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Penyediaan akses jalan yang nyaman dan aman dilalui merupakan salah satu hak asasi dari kelompok difabel, khususnya bagi sabahat tunanetra. Mereka harus terjamin keselamatannya saat melakukan

mobilitas sehari-hari. Fasilitas trotoar yang nyaman dan aksesibel bagi kelompok difabel tentu akan nyaman juga bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, *awareness* mengenai isu disabilitas perlu ditingkatkan agar para teman disabilitas dapat mendapatkan hak fasilitas yang aksesibel.

Inilah yang diperjuangkan Tune Map selama empat tahun terakhir. Tune Map merupakan salah satu komunitas yang mendukung hak disabilitas khususnya membantu akses jalan untuk tuna netra di Indonesia. Yang membedakan Tune Map dengan komunitas tuna netra lain adalah mereka termasuk *social enterprise* yang dibangun *based on community*. Aktivitas utama Tune Map adalah melakukan kampanye advokasi mengenai jalan trotoar yang nyaman dan aksesibel. Tune Map mengembangkan aplikasi berbasis ponsel pintar yang memungkinkan warga kota untuk memberikan informasi dan panduan mengenai kondisi jalanan rute-rute yang aman dilalui oleh teman-teman disabilitas khususnya tuna netra untuk bermobilisasi di dalam kota.

Diperlukan pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan mengintegrasikan kebijakan dengan pemenuhan kebutuhan disabilitas salah satunya perbaikan fasilitas publik. Upaya untuk mewujudkan fasilitas publik yang nyaman tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah semata. Gerakan advokasi harus berlangsung dengan sistematis dan teratur. Di zaman modern di mana semua sudah berbasis data, Tune Map memanfaatkan perkembangan teknologi agar upaya advokasi bisa dilakukan semua orang dengan cepat dan tepat tanpa birokrasi yang rumit. Tujuan utama Tune Map adalah partisipasi warga dalam

pengembangan kota dapat meningkat dan bersinergi menciptakan kota yang inklusif bagi teman-teman penyandang disabilitas.

Salah satu strategi Tune Map dalam menyampaikan informasi kepada publiknya adalah melalui pelaksanaan kampanye yang bertajuk *#MapMyDay*. Kegiatan kampanye ini diawali di Kota Bandung bersamaan dengan semangat Hari Kerelawanan dan Disabilitas Internasional yang jatuh pada bulan Desember, hingga kini *#MapMyDay* dilakukan secara rutin beberapa bulan sekali. Selama kampanye, warga kota secara berkelompok diajak untuk menandai titik-titik yang aman maupun membahayakan untuk dilalui oleh pejalan kaki saat mobilitas di jalanan.

Sehingga, informasi dengan sistem GPS ini dapat dimanfaatkan sebagai petunjuk dalam memilih rute yang aman bagi tuna netra dari jalanan berlubang, penghalang di jalanan hingga ketersediaan *guiding block* yang diinformasikan melalui notifikasi suara. Melalui kampanye *#MapMyDay*, teman-teman relawan juga dapat mengetahui cara berinteraksi secara langsung dengan komunitas disabilitas netra.

Sampai saat ini, aplikasi Tune Map telah mengumpulkan hampir tiga ribu laporan dan telah diunduh oleh 620 pengguna. Laporan yang diterima oleh aplikasi dikumpulkan menjadi informasi bagi tuna netra dan ditindaklanjuti kepada pihak pemerintah. Namun, peserta disabilitas netra merasa pemerintah belum memahami kebutuhan apa saja yang perlu dipenuhi untuk para difabel, mereka belum mendapatkan hak dasar termasuk hal mobilitas, serta belum

melihat adanya perubahan signifikan yang dilakukan pemerintah dari laporan-laporan hasil kegiatan Map My Day yang telah dilaksanakan.

Dengan demikian, upaya peningkatan kesadaran perlu dilakukan karena apabila tidak ada kesadaran terkait hal tersebut, maka tidak akan ada peningkatan aksesibilitas kota. Dengan menggunakan metode studi kasus, penelitian ini dilakukan untuk menganalisa bagaimana kampanye ini terbentuk, strategi kampanye *#MapMyDay* yang dilakukan Tune Map dalam meningkatkan kesadaran isu disabilitas netra.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Kesadaran masyarakat mengenai isu disabilitas masih cenderung rendah, kesadaran yang rendah disebabkan karena terbatasnya diseminasi informasi dan edukasi mengenai disabilitas. Upaya peningkatan kesadaran mengenai disabilitas perlu terus dilakukan agar semua masyarakat dan pemerintah dapat mendukung kota yang ramah untuk semua orang. Pemanfaatan strategi komunikasi melalui kampanye dilihat dapat membantu Tune Map dalam meningkatkan *awareness* masyarakat. Namun, kampanye Map My Day dilakukan tanpa didasari dengan konsep yang mendukung praktik lapangan. Peran Tune Map dalam membangun *awareness* tidak lengkap tanpa adanya perencanaan dan penyusunan strategi kampanye. Karena belum pernah ditemukan penelitian yang menjelaskan hal ini, penelitian ini ingin mengetahui bagaimana strategi kampanye *#MapMyDay* yang dilakukan Tune Map dalam meningkatkan kesadaran isu disabilitas netra.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, pertanyaan penelitian ini adalah :

Bagaimana strategi kampanye *#MapMyDay* yang dilakukan Tune Map dalam meningkatkan kesadaran isu disabilitas netra?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisa strategi kampanye *#MapMyDay* yang dilakukan Tune Map dalam meningkatkan kesadaran isu disabilitas netra.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

#### **1.5.1 Kegunaan Akademis**

1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi sebagai bahan pembelajaran dan memperkaya referensi khususnya pada bidang *strategic communication* terkait strategi kampanye dalam membangun kesadaran.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan dalam komunitas atau organisasi serupa dalam merencanakan kampanye sosial.

#### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

1. Hasil penelitian diharapkan dapat membuat masyarakat menyadari pentingnya suatu kegiatan kampanye yang dilakukan dapat berpengaruh dalam membangun kesadaran.
2. Dapat memberikan manfaat, wawasan maupun masukan bagi Tune Map dan kebutuhan organisasi serupa dalam merencanakan strategi kampanye.

### **1.5.3 Kegunaan Sosial**

Selain nilai guna akademis dan praktis, penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi sosial antara lain untuk menambah inspirasi bagi masyarakat dan organisasi serupa dalam mendukung pemenuhan hak teman-teman disabilitas serta meminimalkan keterbatasan dan hambatan yang masih terjadi.

### **1.6 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan strategi kampanye *#MapMyDay* oleh Tune Map dalam meningkatkan *awareness* isu disabilitas netra. Penelitian ini mengacu pada konsep perencanaan *public relations* Cutlip, Center dan Broom yang diturunkan ke dalam konsep perencanaan kampanye milik Anne Gregory. Penelitian ini hanya fokus kepada strategi kampanye *#MapMyDay* oleh Tune Map dalam meningkatkan *awareness* sampai Januari 2020.